

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap organisasi masing-masing mempunyai tujuan yang hendak diraih, baik organisasi perusahaan maupun organisasi sektor publik atau pemerintahan. Sebagai salah satu bentuk organisasi, pemerintah memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyatnya (Hasanah & Fauzi, 2017). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap instansi berperan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penilaian Kinerja organisasi menjadi begitu penting ditengah perkembangan zaman yang cepat ini. Penilaian ini dibutuhkan guna melihat apakah sebuah organisasi berada didalam kondisi sehat ataupun tidak. Manajemen perusahaan perlu mengetahui tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian ini bisa menolong manajemen didalam mengambil keputusan ataupun kebijakan yang sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi/perusahaan itu.

Kinerja keuangan umumnya diukur memakai sejumlah rasio keuangan. Mulai dari rasio likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Menurut Munawir (2014), tujuan pengukuran kinerja keuangan yaitu mendeteksi tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas perusahaan. Dengan mengetahui tingkat-tingkat tersebut, manajemen dapat membuat

keputusan/kebijakan yang bisa menolong perusahaan didalam meraih tujuannya.

Berasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 “BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah.” BUMN memiliki peran penting didalam menyelenggarakan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN juga satu dari beberapa badan usaha yang diselenggarakan untuk menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. BUMN harus terus bertahan dalam kondisi ekonomi negara yang baik maupun yang sedang turun untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dalam pesatnya persaingan dan kondisi perekonomian yang ada, diperlukan sebuah sistem penilaian kondisi perusahaan yang bisa memberi dorongan bagi perusahaan kearah peningkatan keefesienan serta daya saing. Sistem ini dipakai menjadi landasan guna melakukan evaluasi terhadap perusahaan supaya dapat bersaing di tengah kondisi yang ada. Pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 menetapkan tata cara atau ketentuan-ketentuan guna melakukan penilaian kondisi dan tingkat kesehatan perusahaan.

Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 di buat mengingat perkembangan usaha yang semakin pesat jadi perlunya landasan penilaian kinerja yang bisa memberi dorongan bagi perusahaan kearah peningkatan

efisiensi serta daya saing BUMN. Penilaian meliputi aspek keuangan, aspek operasional serta aspek administrasi. Pada akhirnya penilaian kinerja ini akan menghasilkan tingkat kesehatan perusahaan saat itu. Penilaian ini sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan supaya dapat terus bertahan dalam kondisi perkembangan usaha dan kondisi ekonomi yang ada.

Pada bulan Desember tahun 2019, suatu kelompok virus ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini memiliki nama *Coronavirus disease 2019* atau umumnya disingkat *Covid-19*. Virus ini menghebohkan dunia karena menginfeksi hewan dan manusia, dan kasus infeksi virus ini menyebabkan banyak korban jiwa di awal kemunculannya. Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia yang dikenal juga dengan *WHO* menetapkan bahwa kasus virus corona ini menjadi pandemi global karena banyaknya kasus infeksi dan korban jiwa yang disebabkan oleh virus ini.

Di Indonesia, pandemi *covid-19* yang ditetapkan oleh WHO juga sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April tahun 2020 melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Sejak kasus pertama infeksi *Covid-19* ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus infeksi dan kematian masyarakat yang disebabkan oleh virus ini terus bertambah. Menimbang kasus infeksi kasus ini yang menimbulkan banyak dan korban jiwa serta kerugian material yang besar juga telah berdampak bagi aspek sosial, ekonomi, juga kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 7 Tahun 2020 membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Gugus Tugas ini memiliki tujuan guna membuat ketahanan nasional pada bidang kesehatan meningkat, membuat

penanganan covid-19 menjadi dipercepat, membuat antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran virus meningkat, dan masih banyak lagi.

Satu dari sejumlah kebijakan yang pemerintah ambil guna mencegah serta membuat persebaran virus ini berkurang ialah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini ditetapkan didalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Pada PP Nomor 21 Tahun 2020, PSBB paling sedikit mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan beragama, jug pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sesuai dengan Ekonom *Institute for Development of Economics & Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira pandemi covid-19 dan penerapan PSBB akan berdampak kepada ekonomi dan semua sektor usaha. Terbukti dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07%. PDB Indonesia turun dari Rp. 10.949 Triliun menjadi Rp. 10722,4 Triliun. Penurunan ini bertolakbelakang terhadap yang terjadi pada 4 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kuranglebih berkontraksi positif sebanyak 5%. Berikut data PDB Indonesia tahun 2016 sampai 2020 yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel I.1: PDB Indonesia Tahun 2016 s.d 2020**

Tahun	PDB (Dalam Triliun Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	9434,6	5,03
2017	9912,7	5,07
2018	10425,9	5,17
2019	10949	5,02
2020	10722,4	-2,07

Sumber: bps.go.id

Sektor-sektor usaha pun ikut berkontraksi di masa pandemi covid-19. Sesuai dengan data yang dikumpulkan melalui BPS, kontraksi paling besar terdapat pada sektor transportasi dan pergudangan. Peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi dan mencegah penyebaran covid-19 seperti PSBB cukup berdampak bagi sektor ini. Kegiatan masyarakat yang biasanya diadakan di luar rumah dibatasi oleh pemerintah membuat masyarakat tidak menggunakan transportasi untuk berpergian menjalani kegiatannya. Secara keseluruhan, covid-19 dan aturan-aturannya yang ditetapkan tahun 2020 ini membuat laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan menurun sebanyak  $\pm 15\%$ . Penurunan ini bertolakbelakang dengan yang terjadi sejak 4 tahun sebelumnya. Di tahun 2016 sampai 2019, sektor ini terus mengalami laju pertumbuhan yang positif walaupun pada tahun 2018 ada penurunan persentase laju pertumbuhan dari bertumbuh  $\pm 8,5\%$ . Menjadi bertumbuh  $\pm 7\%$ . Hal itu terjadi karena karenakan harga minyak sebagai bahan bakar transportasi sempat melambung tinggi. Berikut data laju pertumbuhan sektor transportasi di Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel I.2: Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2016 s.d 2020**

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2016	7,45
2017	8,49
2018	7,05
2019	6,39
2020	15,04

Sumber: bps.go.id

PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan (ASDP) merupakan satu dari beberapa BUMN yang bergerak didalam bidang transportasi serta logistik. PT ASDP mehubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia melalui jalur laut. PT ASDP harus mampu bertahan dalam persaingan dan kondisi ekonomi yang ada mengingat bahwa ia adalah penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia serta kegunaan ia sebagai BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.

Sebagai BUMN yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, BUMN ini harus bertahan dalam persaingan dan kondisi ekonomi yang ada. Walaupun terjadi fluktuasi dalam keuangannya, PT ASDP harus tetap bertahan dan bersaing. Ringkasan laporan keuangan PT ASDP mulai tahun 2016 hingga 2020 terdapat didalam tabel dibawah ini.

**Tabel I.3: Ringkasan Laporan Keuangan PT ASDP Tahun 2016 s.d 2020**

Tahun	Aset	Liabilitas	Ekuitas	Laba/Rugi
2016	7,871,328,826,844	1,243,084,769,348	6,628,244,057,496	181,147,127,431
2017	7.599.897.223.169	1.124.072.767.998	6.475.824.455.171	318.103.924.397
2018	7.318.352.004.336	1.095.010.544.372	6.223.341.459.964	255.632.789.347
2019	6.426.037.160.584	548.062.324.120	5.877.974.836.464	269.263.765.179
2020	6.229.546.566.174	521.515.257.616	5.708.031.308.558	233.413.157.423

Sumber: Laporan Keuangan PT Angkutan Sungai Dan Penyebrangan

Dari uraian pentingnya peran penting BUMN untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, kondisi perekonomian Indonesia, kondisi sektor transportasi dan pergudangan, serta ringkasan laporan keuangan PT ASDP dari tahun 2016 sampai 2020, maka penulis memiliki ketertarikan guna melangsungkan penerlitian tentang bagaimana kondisi dari kinerja keuangan PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan (ASDP) tahun 2016-2020 sesuai

dengan Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002. Oleh karena itu penelitian ini akan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan PT Angkutan Sungai Dan Penyebrangan Persero Tahun 2016-2020 (Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti ialah:

1. Bagaimana skor kinerja keuangan PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan tahun 2016-2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai didalam penulisan karya ilmiah ini ialah:

- a. Untuk mengetahui kategori dan predikat kinerja keuangan PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan tahun 2016 hingga tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui pertumbuhan kinerja keuangan PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan tahun 2017 hingga 2020.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil melalui penelitian ini ialah seperti dibawah ini:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah media belajar untuk memecahkan permasalahan dengan ilmiah dalam mengukur kinerja keuangan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Kep-100/MBU/2002,

b. Bagi PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan refrensi serta input untuk PT Angkutan Sungai dan Penyebrangan untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk memberi gambaran dalam meneliti penelitian sejenis pada masa mendatang